



Tentukan Status Kedaruratan PMK atau Tidak

Hasil Kajian Epidemiologi Ditargetkan Selesai Pekan Depan

JOGJA - Pemprov menaruh perhatian khusus terhadap munculnya virus penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyebar di DIJ. Sekprov Beny Suharsono mengambil langkah taktis dan memerintahkan dinas terkait untuk melakukan kajian epidemiologi. "Selambat-lambatnya Senin (13/1) harus memutuskan langkah akan dilakukan status kedaruratan atau tidak," ujarnya saat ditemui di Kompleks Kepatihan Jogja, kemarin (10/1). Status kedaruratan bisa diberlakukan

dengan melalui kajian epidemiologi. Maka dari itu pihaknya mulai mengumpulkan dinas dan lembaga terkait untuk melakukan upaya itu. Setelah ada hasil, kajian bisa segera disampaikan pekan depan. "Ada daerah-daerah yang saat ini kondisinya, menurut saya, sudah menyatakan darurat PMK," tuturnya.

Diketahui virus PMK telah menyebar di seluruh kabupaten se-DIJ, selain di Kota Jogja. Adanya status kedaruratan itu nantinya akan mempercepat pencegahan persebaran virus. Salah satunya dengan cara memanfaatkan akses belanja tidak terduga (BTT). "Kalau menyatakan

darurat, maka anggaran yang dikelola melalui BTT harus dikeluarkan," bebernya.

Jika status darurat itu telah diberlakukan, maka provinsi secara otomatis akan ikut bergerak melakukan penanggulangan bersama. Beberapa hal akan dilakukan seperti memastikan ketersediaan vaksin.

Menurutnya, vaksin sampai di DIJ umumnya pada bulan Maret, namun itu bisa disegerakan apabila kondisinya darurat. "Kami bisa beli, bisa kerja sama melalui CSR juga," jelasnya.

Selanjutnya memperketat penjagaan kebersihan ternak juga dinilai penting. Upaya ekstra akan dilakukan apabila status darurat telah ditetapkan di

kabupaten/kota terlebih dahulu melalui kajian epidemiologi.

"(Kajian) itu cepat kok. Kita punya para ahli di fakultas peternakan, juga Balai Veteriner," tegasnya.

Ia menambahkan, saat ini baru sekitar 1.000 dari total 1.800-an kasus yang tertangani. Hal ini menunjukkan urgensi untuk bergerak cepat dalam menangani wabah, demi melindungi kesehatan ternak serta perekonomian masyarakat yang terdampak.

Terkait teknis penyelenggaraan kajian, *Radar Jogja* telah mencoba menghubungi kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, namun belum ada respons. (**oso/laz/by**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanian dan Pangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005